

## **Implementasi Kebijakan PPKM Darurat dalam Pengendalian Kasus Covid-19 di Kota Padang**

Dian Paramitha Asyari<sup>1</sup>, Gusrianti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Kesehatan Masyarakat STIKes Alifah, Jl. Khatib Sulaiman No. 52 B Padang, Indonesia

Email: [dianparamitha6692@gmail.com](mailto:dianparamitha6692@gmail.com)<sup>1</sup>, [gusrianti819@gmail.com](mailto:gusrianti819@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Tren kasus positif Covid-19 cenderung berada di siklus naik dan turun. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan saat kasus mulai menanjak naik. Tercatat selama penanganan kasus sudah tiga macam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memutus mata rantai penularan kasus Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif penerapan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dalam mengendalikan kasus positif Covid-19 di Kota Padang. Metode yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif dengan teknik penentuan informan secara *Purposive sampling* di Dinas Kesehatan Kota Padang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota sebagai Satuan Tugas Covid-19. Penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2021 sampai Januari 2022. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan diterapkannya PPKM darurat mampu mengendalikan laju kasus positif Covid-19 di Kota Padang.

Kata Kunci : Kebijakan, PPKM darurat, Covid-19

### ***Implementation of Emergency PPKM to Controlling Covid-19 Cases in Padang***

#### ***Abstract***

*The trend of positive cases of Covid-19 tends to be in fluctuate cycle. This is influenced by the policies that are implemented when cases start to climb up. During the handling of cases, three kinds of policies were carried out by the Indonesian government in order to break the chain of transmission of Covid-19 cases. This study aims to see how effective the implementation of the emergency Community Activity Movement Restriction (PPKM) is in controlling positive cases of Covid-19 in the city of Padang. The method used is a qualitative approach with the technique of determining informants by purposive sampling at the Padang City Health Office and the City Regional Disaster Management Agency as the Covid-19 Task Force. The study was conducted from October 2021 to January 2022. The results of the study explained that with the implementation of the emergency PPKM, they were able to control the rate of positive cases of Covid-19 in the city of Padang.*

*Keywords: Policy, emergency PPKM, Covid-19*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, dunia masih diguncang oleh pandemik hebat bernama Covid-19 (*Corona Virus Disease*). Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 sudah sulit dikendalikan diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirale. Kebijakan Pemberlakuan *Lock Down* Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19 (Yunus & Rezki, 2020).

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya (Joharudin, Septiadi, Maharani, & Nurwahyuningsih, 2020).

Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang

dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Wahidah, Rafqie, & Hartono, 2020).

Kebijakan yang muncul akibat wabah virus corona terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah. Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan *lockdown*. *Lockdown* dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial (Undang-Undang Nomor 6, 2018; Yunus & Rezki, 2020).

Selama kebijakan *lockdown* dilakukan di Indonesia, terjadi penurunan kasus positif Covid-19. hal ini dikarenakan pemerintah bertekad untuk memutus penularan virus secara langsung. Setelah kebijakan *lockdown* dilonggarkan maka Indonesia beralih ke kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal yang membedakan adalah masyarakat diperbolehkan melakukan aktifitas luar dan masih didalam wilayah masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Arif, 2021).

Kebijakan PSBB ini juga berlaku di Kota Padang. Tercatat Kota Padang memberlakukan PSBB dari bulan Maret 2020 sampai Juni 2020. Selama kebijakan PSBB diterapkan Kota Padang mengalami penurunan kasus positif Covid-19 secara signifikan yaitu sebanyak 2387 kasus pada bulan Maret 2020 menurun menjadi 507 kasus pada

bulan Juni 2020 dengan terus aktif melakukan *screening* dini dan *tracker* kasus. Terjadinya penurunan kasus menandakan suksesnya pelaksanaan PSBB di Kota Padang, selain itu adanya komitmen bersama dari berbagai kalangan untuk tetap patuh menerapkan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Pemberlakuan PSBB ini diatur dalam Peraturan Walikota Padang nomor 32 Tahun 2020 dengan tujuan kebijakan ini mampu menekan laju perkembangan dan penyebaran Covid-19, membatasi pergerakan masyarakat yang keluar - masuk Kota Padang serta memberikan batasan terhadap aktifitas masyarakat (Peraturan Walikota Padang Nomor 32, 2020).

Setelah kebijakan PSBB berakhir, pemerintah secara bertahap mulai mencanangkan kebijakan baru yaitu Era *New Normal* sebagai upaya agar masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19. Beberapa daerah mulai menerapkan kebiasaan ini termasuk Kota Padang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan kegiatan masyarakat. Namun era normal baru dinilai tidak efektif dalam menurunkan kasus positif Covid-19 karena mulai longgarnya pengawasan protokol kesehatan dan mulai banyaknya masyarakat yang tidak mentaati aturan tersebut. Tercatat kenaikan kasus positif dari bulan Juli 2020 hingga Juli 2021 sejak diterapkannya kebijakan normal baru di Kota Padang dari 661 kasus pada bulan Juli 2020 menjadi 12.446 kasus pada akhir Desember 2020 (Dinas Kesehatan Kota Padang, 2020 - 2021).

Memasuki awal tahun 2021 jumlah kasus positif di masa era normal baru di Kota Padang tetap mengalami kenaikan, tercatat Januari 2021 sebanyak 13.490 jumlah total penderita positif Covid-19, angka ini terus meningkat hingga pada akhir Juli 2021 mencapai 34.037 jumlah total kasus positif. Tentunya hal ini kembali menjadi perhatian pemerintah untuk kembali menerapkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat yang dinamakan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dengan tujuan mampu mengendalikan laju kasus

positif Covid-19. melalui surat edaran Walikota Padang nomor 400.599 tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Pencegahan Covid-19 menjelaskan bahwa aturan ini berlaku bagi setiap komponen masyarakat termasuk dalam hal ibadah dan sekolah. Mulai diberlakukan kembali bekerja dari rumah sambil terus mencanangkan wajib vaksin bagi masyarakat. Aturan ini juga mencakup jam operasional sampai jam 17.00 dengan kapasitas layanan hanya 25% saja (Surat Edaran Walikota Padang Nomor 400.599, 2021).

Wawancara awal dengan salah satu petugas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 BPBD Kota Padang, menjelaskan bahwa tujuan utama perberlakuan PPKM darurat adalah untuk mengendalikan sekaligus membatasi kerumunan masyarakat sebagai upaya memutus mata rantai penularan virus. Selain itu Satgas Covid juga bekerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian untuk mengawasi langsung dilapangan kegiatan masyarakat termasuk jam operasional pelayanan, penggunaan masker dan protokol kesehatan lainnya dengan harapan dapat memutus dan meminimalisir resiko penularan virus Covid-19.

Berdasarkan latar belakang dan wawancara awal dengan Satgas Covid dengan membandingkan jumlah temuan kasus positif Covid di Kota Padang selama pemberlakuan PPKM, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh Implementasi Kebijakan PPKM Darurat dalam Pengendalian Kasus Positif Covid-19 di Kota Padang Tahun 2021.

## METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 - Januari 2022 di Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Padang. Teknik penentuan informan/sampel penelitian yang digunakan adalah secara *purposive sampling* dengan informan penelitian Kepala Bidang P2M Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Kota Padang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a) Kasus Covid-19 Sebelum PPKM Darurat

Hasil wawancara dengan informan penelitian didapatkan keterangan bahwa pengendalian Covid-19 di Kota Padang sebelum PPKM darurat cenderung lebih sulit dilakukan. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang semakin meningkat setiap bulannya, seperti pemaparan informan berikut :

*“ Sulit, terutama dalam menyuruh memakai masker dan menjaga jarak. Era normal baru justru tidak ada bedanya dengan sebelum Covid-19 ”(If-02).*

*“ Pengawasan protokol kesehatan tetap rutin dilakukan namun tidak maksimal, denda dan teguran berjalan namun untuk mengawasi pergerakan masyarakat selama 24 jam tidak mungkin dilakukan. Hal itu yang menyebabkan kasus Covid-19 semakin tinggi di Padang. Belum lagi masyarakat yaang OTG namun tetap berkeliaran normal ” (If-01).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan kasus Covid-19 sebelum diberlakukan PPKM darurat cenderung mengalami kenaikan. Dibuktikan dengan data dari Dinas Kesehatan Kota Padang dari bulan Januari 2021 hingga Juli 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Padang sebanyak 34.037 kasus (Dinas Kesehatan Kota Padang, 2020 - 2021).

Hal ini membuktikan bahwa era normal baru yang berubah hanya kebiasaan memakai masker, namun tidak efektif untuk memutus mata rantai penularan dari virus Covid-19. kebiasaan memakai masker hanya dilakukan diawal - awal perberlakukan era new normal saja. Masih kurangnya pengawasan protokol kesehatan yang dilakukan membuat aturan ini menjadi longgar dan kenaikan kasus positif dengan bergejala dan tidak bergejala tidak dapat dicegah secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek (2021) juga menjelaskan bahwa

diberlakukannya era normal baru di Indonesia tidak mempunyai dampak sama sekali terhadap penurunan kasus Covid-19. Lonjakan kasus di era normal baru justru lebih memprihatinkan dan mau tidak mau pemerintah harus kembali mengeluarkan aturan baru untuk menekan lonjakan kasus yang mulai naik kembali, yaitu kebijakan pemberlakuan PPKM darurat yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi kondisi masing - masing daerah. Pemerintah wajib melakukan pengawasan secara maksimal guna memutus penularan Covid-19. (Mahadewi, 2021).

### b) Kasus Covid-19 Setelah PPKM Darurat

Hasil wawancara dengan informan penelitian didapatkan keterangan bahwa pengendalian Covid-19 di Kota Padang setelah PPKM darurat diberlakukan dinilai lebih efektif dengan dibuktikan mulai melandainya kasus terkonfirmasi positif Covid-19. selain itu gebrakan Sumatera Barat sadar vaksin juga merupakan salah satu upaya pencegahan lebih lanjut dalam upaya *herd immunity* masyarakat, seperti pemaparan informan berikut :

*“ Permemberlakukan PPKM darurat level 4 dimulai pada Juli 2021. Pemerintah memutuskan menerapkan aturan tersebut setelah Jawa dan Bali lebih dulu menerapkannya. Alasan Walikota memberlakukan PPKM darurat level 4 karena jumlah kasus Covid-19 pada Juli 2021 sebanyak 34.037 kasus ” (If-01).*

*“ Kami dari Dinas Kesehatan Kota setuju dengan penerapan PPKM darurat level 4 di Kota Padang, diharapkan mampu untuk menekan laju penularan Covid-10 karena sudah diberlakukannya era normal baru. Dengan adanya PPKM darurat ini masyarakat semakin menyadari bahwa dibutuhkan upaya bersama untuk memutus mata rantai penularan ”(If-02).*

*“ Dengan diterapkannya PPKM darurat level 4 di Kota Padang membuat laju penularan positif Covid-19 di Padang mulai bisa dikendalikan*

*walau tercatat pada bulan Oktober kasus konfirmasi positif Covid masih mengalami kenaikan menjadi 41.052 kasus disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak patuh pada PPKM darurat” (If-02).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa 1 bulan pelaksanaan PPKM darurat belum memberikan dampak bagus terhadap penurunan laju kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan PPKM darurat ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam edarannya Pemerintah Kota Padang mulai memberlakukan sanksi dan denda bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan. Sanksi ini juga berlaku bagi pemilik tempat makan di Kota Padang. Sanksi berupa denda dan penutupan sementara tempat-tempat yang memang tidak mematuhi aturan PPKM darurat.

Data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dari Dinas Kesehatan Kota Padang menunjukkan bahwa selama PPKM darurat level 4 diterapkan tidak terjadi kenaikan dan penambahan kasus Covid-19 secara signifikan. Tercatat pada bulan September 2021 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 41.061 kasus dengan total kasus sembuh sebanyak 41.378. Kemudian pada bulan Oktober terdapat sebanyak 42.197 kasus dengan total kasus yang sembuh sebanyak 41.621 kasus. Pada bulan November 2021 terdapat sebanyak 42.227 total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 41.672 kasus. Memasuki bulan Desember 2021 hingga 03 Januari 2022 jumlah total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 berhenti di angka 42.242 kasus dengan total kasus sembuh yang meningkat menjadi 41.687 kasus dan tidak ada penambahan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Padang. (Dinas Kesehatan Kota Padang, 2020 - 2021).

Berdasarkan dari hal tersebut maka Pemerintah memutuskan menurunkan level PPKM dari level 4 menjadi level 2 terhitung dari November 2021. Gebrakan baru terus digencarkan oleh pemerintah Kota Padang adalah mewujudkan masyarakat Kota Padang sadar vaksin. Terbukti angka

cakupan vaksin di Kota Padang sudah melebihi target yang ditentukan oleh nasional yakni mencapai 70% dari jumlah populasi dari 40% target nasional. Dengan terlaksananya aturan kebijakan PPKM darurat dan gerakan masyarakat sadar vaksin membuat seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang dinyatakan bebas Covid-19 karena tidak adanya penambahan kasus konfirmasi baru. Sehingga pemerintah terfokus pada pasien yang masih dalam proses pemulihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et.al* (2021) juga menjelaskan bahwa salah satu dampak positif diberlakukannya aturan kebijakan PPKM darurat adalah mampu menurunkan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Selain itu PPKM darurat juga mampu meminimalkan tingkat penularan langsung virus dikarenakan pergerakan masyarakat dibatasi terutama ditempat-tempat keramaian (Puja Sintia Dewi & Dina Sonia, 2021).

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2021) menjelaskan bahwa Kebijakan PPKM darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Muara dari kebijakan ini adalah kesadaran dan pemahaman yang menggerakkan setiap warga negara untuk saling jaga, terutama menjaga warga negara yang rentan agar tidak terpapar Covid-19. Pemerintah perlu menyampaikan bahwa aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, merupakan pertimbangan pemerintah sebelum melakukan beberapa penyesuaian terkait pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap melalui asesmen level PPKM (Mohammad Mulyadi, 2021)

## SIMPULAN

1. Keadaan kasus Covid-19 sebelum diberlakukan PPKM darurat cenderung mengalami kenaikan. Dibuktikan dengan data dari Dinas Kesehatan Kota Padang dari

bulan Januari 2021 hingga Juli 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Padang sebanyak 34.037 kasus.

2. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 menunjukkan bahwa selama PPKM darurat level 4 diterapkan tidak terjadi kenaikan dan penambahan kasus Covid-19 secara signifikan.

3. Gebrakan baru yang terus digencarkan oleh pemerintah dengan mewujudkan masyarakat sadar vaksin. Cakupan vaksin di Kota Padang sudah melebihi target yang ditentukan oleh nasional yakni sebanyak 70% dari jumlah populasi dari 40% target nasional.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Pelaksanaan penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu tidak lupa ucapan terima kasih diucapkan kepada BPBD Kota Padang yang telah memfasilitasi waktu dan kesempatan selama penelitian berlangsung. Kepada Dinas Kesehatan Kota Padang yang telah memberikan data dan informasi terkait penelitian. Peneliti ucapkan terimakasih kepada STIKes Alfah Padang yang telah memfasilitasi penelitian dari awal hingga penelitian ini selesai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. A. (2021). Strategi Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 Melalui Kebijakan PSBB. *Jurnal Puslitbang*, 24 (2). doi: <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v24i2.147>
- Dinas Kesehatan Kota Padang. (2020 - 2021). Situasi Terkini Perkembangan Kasus Corona Virus Disease Kota Padang (P. P. Menular, Trans.). In Dinas Kesehatan Kota Padang (Ed.). Padang: Dinas Kesehatan Kota Padang.
- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., & Nurwahyuningsih. (2020). Panic Syndrome Covid-19 : Penekaan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. *Jurnal Perspektif*, 4 (1), 44-53.
- Mahadewi, K. J. (2021). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk

Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 9 Nomor 10.

- Mohammad Mulyadi. (2021). Penerapan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi Covid-19 *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI, XIII Nomor 16.*
- Peraturan Walikota Padang Nomor 32. (2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 19.* Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Puja Sintia Dewi, & Dina Sonia. (2021). Dampak PPKM Terhadap Penurunan Angka Pasien Covid-19 di Puskesmas Cikalong. *Jurnal Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1 Nomor 9.
- Surat Edaran Walikota Padang Nomor 400.599. (2021). *Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Pencegahan Covid-19.* Padang: BPBD Padang.
- Undang-Undang Nomor 6. (2018). *Karantina Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Wahidah, I., Rafqie, M. C. A., & Hartono, N. F. S. (2020). *COVID-19 Pandemic: Analysis of Government and Community Planning in Various Prevention Measures.* *jurnal Manajemen Organisasi Kesehatan*, 11 (3), 179 - 188.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Sosial Budaya dan Syar'i*, 7 (3).